

**BAB III**  
**DESKRIPSI UMUM PROFESI GURU DAN PENDIDIKAN PROFESI**  
**GURU DI INDONESIA**

**A. Gambaran Umum Profesi Guru di Indonesia**

Kondisi umum profesi guru di Indonesia dapat dilihat dari berbagai data mengenai jumlah guru baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, serta guru yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Disamping itu, data mengenai kualifikasi guru dan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) juga dapat berguna untuk mengukur kualitas guru-guru di Indonesia. Berdasarkan Data Guru Nasional – Dapodikdasmen pada tahun 2019-2020 jumlah guru di Indonesia yang tersebar di dalam negeri yakni di 34 provinsi dan luar negeri disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**

**Data Guru Nasional Dapodikdasmen Tahun 2019-2020**

No	Wilayah	Total Jml
1	Prov. Jawa Barat	376,880
2	Prov. Jawa Timur	332,281
3	Prov. Jawa Tengah	297,609
4	Prov. Sumatera Utara	182,265
5	Prov. Sulawesi Selatan	117,258
6	Prov. Sumatera Selatan	98,708
7	Prov. Banten	96,546
8	Prov. Lampung	95,283
9	Prov. Nusa Tenggara Timur	94,070
10	Prov. Aceh	86,106
11	Prov. Riau	84,670
12	Prov. D.K.I. Jakarta	81,031
13	Prov. Sumatera Barat	77,908
14	Prov. Nusa Tenggara Barat	68,293
15	Prov. Kalimantan Barat	60,584

16	Prov. Bali	47,139
17	Prov. Jambi	45,255
18	Prov. Kalimantan Selatan	44,783
19	Prov. Kalimantan Timur	43,457
20	Prov. Sulawesi Tengah	43,169
21	Prov. Sulawesi Tenggara	42,940
22	Prov. D.I. Yogyakarta	39,738
23	Prov. Kalimantan Tengah	39,529
24	Prov. Sulawesi Utara	33,075
25	Prov. Maluku	31,379
26	Prov. Papua	30,569
27	Prov. Bengkulu	28,070
28	Prov. Kepulauan Riau	24,169
29	Prov. Sulawesi Barat	20,923
30	Prov. Maluku Utara	19,960
31	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	15,271
32	Prov. Gorontalo	14,932
33	Prov. Papua Barat	14,146
34	Prov. Kalimantan Utara	10,205
35	Luar Negeri	865
	<b>Total</b>	<b>2.739.066</b>

Merujuk Data Guru Nasional – Dapodikdasmen pada tahun 2019-2020, jumlah guru se-Indonesia berjumlah 2.739.066. Namun, dari total guru se-Indonesia, jumlah guru di pulau Jawa masih mendominasi dibanding pulau-pulau lainnya. Provinsi Jawa Barat masih menempati urutan pertama dengan jumlah guru sebanyak 376,880. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah guru sebanyak 332,281. Terakhir Provinsi Jawa Tengah juga termasuk dalam tiga tertinggi dengan jumlah guru sebanyak 297,609. Sementara itu untuk provinsi dengan jumlah guru yang relatif sedikit terdapat di Provinsi Gorontalo sebanyak 14,942, Provinsi Papua Barat sebanyak 14,146 dan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 10,205.

Adapun sebaran guru tersebut dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**

**Jumlah Guru Berdasarkan Sebaran Pada Setiap Jenjang Pendidikan  
Menurut Data Guru Nasional Dapodikdasmen Tahun 2019-2020**

<b>No.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	SD	1.447.701
2.	SMP	647.672
3.	SMA	313.584
4.	SMK	304.467
5.	SLB	25.642

Merujuk data tersebut, jumlah guru pada tingkat Sekolah Dasar (SD) masih mendominasi sebanyak 1.447.701. Pada tingkat SMP sebanyak 647.672. Sementara itu, jumlah yang relatif kecil terdapat pada jenjang SMA, SMK dan SLB. Jumlah guru pada jenjang SMA sebanyak 313.584, SMK sebanyak 304.467, dan SLB sebanyak 25.642. Jumlah ini tentunya masih belum mencukupi kebutuhan guru di Indonesia.

Jumlah guru tersebut dapat dibedakan berdasarkan status kepegawaiannya, diantaranya yaitu berstatus PNS atau NonPNS, guru honor sekolah, guru tetap yayasan (GTY), guru tidak tetap (GTT) Provinsi, guru tidak tetap (GTT) Kabupaten/Kota, guru bantu pusat maupun guru lainnya. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia yang dilansir oleh Databoks, pada tahun 2019 guru berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.3.****Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian**

<b>No.</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	PNS	1,5 juta
2.	Guru Honor Sekolah	704,5 ribu
3.	Guru Tetap Yayasan (GTY)	401,2 ribu
4.	Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten/Kota	141,7 ribu
5.	Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi	13,3 ribu
6.	Guru Bantu Pusat	3,7 ribu
7.	Lainnya.	121,4 ribu

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019, masih terdapat guru yang berstatus non-PNS dan non tetap yayasan sebanyak 33,9% atau 984.600 guru di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari guru honorer sekolah sebanyak 704,5 ribu, guru tidak tetap (GTT) di kabupaten/kota sebanyak 141,7 ribu, guru tidak tetap (GTT) provinsi sebanyak 13,3 ribu, guru bantu pusat sebanyak 3,7 ribu, dan guru lainnya sebanyak 121,4 ribu. Sementara itu untuk guru berstatus PNS dan guru berstatus tetap yayasan sebanyak 52,3%. Jumlah tersebut terdiri dari guru PNS sebanyak 1,5 juta, dan guru tetap yayasan sebanyak 401,2 ribu.

Adapun sebaran guru PNS baik di dalam negeri yakni tiap provinsi maupun luar negeri dapat dilihat dalam tabel berikut sebagaimana dilansir oleh Databoks mengenai persebaran guru PNS di Indonesia berdasarkan data Kemendikbud pada tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Persebaran Guru PNS di Indonesia**

<b>No</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Total Jml</b>
1	Provinsi Jawa Timur	190.787
2	Provinsi Jawa Tengah	181.070
3	Provinsi Jawa Barat	180.349
4	Provinsi Sumatera Utara	97.516
5	Provinsi Sulawesi Selatan	70.199
6	Provinsi Sumatera Selatan	53.034
7	Provinsi Sumatera Barat	52.363
8	Provinsi Lampung	51.061
9	Provinsi Aceh	50.545
10	Provinsi NTT	44.244
11	Provinsi Banten	40.694
12	Provinsi Riau	40.627
13	Provinsi Kalimantan Barat	36.619
14	Provinsi NTB	32.671
15	Provinsi Kalimantan Selatan	30.923
16	Provinsi Bali	30.011
17	Provinsi DKI Jakarta	29.918
18	Provinsi Jambi	28.259
19	Provinsi Sulawesi Tengah	27.398
20	Provinsi Kalimantan Tengah	27.291
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	25.456
22	Provinsi DI Yogyakarta	24.377
23	Provinsi Kalimantan Timur	23.971
24	Provinsi Maluku	23.755
25	Provinsi Sulawesi Utara	23.308
26	Provinsi Bengkulu	18.799
27	Provinsi Papua	17.975
28	Provinsi Maluku Utara	12.692
29	Provinsi Sulawesi Barat	10.362
30	Provinsi Bangka Belitung	10.272
31	Provinsi Gorontalo	9.827
32	Provinsi Kepulauan Riau	9.590
33	Provinsi Papua Barat	8.517
34	Provinsi Kalimantan Utara	5.862
35	Provinsi Luar Negeri	12

Data tersebut menunjukkan bahwa sebaran guru PNS di Indonesia, masih didominasi oleh daerah pulau Jawa yakni Provinsi Jawa Timur sebanyak 190,8 ribu orang, lalu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 181 ribu orang, dan Jawa Barat sebanyak 180,3 ribu orang. Sementara itu, jumlah guru PNS yang relatif sedikit terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 5,8 ribu, kemudian Papua Barat sebanyak 8,5 ribu, dan Kepulauan Riau sebanyak 9,6 ribu. Dengan demikian, masih terdapat ketimpangan jumlah guru PNS di setiap daerah.

Jumlah guru di atas tentunya terus mengalami perubahan dan perkembangan. Akan tetapi yang menjadi persoalan dalam perkembangannya adalah banyaknya jumlah guru yang akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Sebagaimana dilansir oleh Databoks mengenai data proyeksi guru yang akan pensiun menurut Kemendikbud dari tahun 2019-2023 mencapai 316 ribu. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5.**

**Proyeksi Guru Pensiun 2019-2023**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Guru yang Pensiun</b>
1.	2019	39.064
2.	2020	46.867
3.	2021	64.773
4.	2022	77.535
5.	2023	88.296

Data proyeksi guru yang akan pensiun dalam rentang waktu 2019 sampai 2023 tersebut menunjukkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 saja sudah ada 39.064 guru yang pensiun, kemudian pada tahun 2020

diproyeksi sebanyak 46.867. Sementara itu pada tahun 2021 sebanyak 64.773, lalu pada tahun 2022 sebanyak 77.535, serta pada tahun 2023 sebanyak 88.296. Total dari jumlah tersebut yakni mencapai 316,5 ribu guru yang akan pensiun dalam rentang waktu 2019-2023.

Banyaknya guru yang akan pensiun tentu memiliki dampak kepada kurangnya jumlah guru di Indonesia. Jumlah guru yang minim serta banyaknya guru yang akan pensiun tentu sangat berdampak pada kurangnya guru di Indonesia. Menurut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saja menyebutkan bahwa per 1 Agustus 2019, kekurangan guru di Indonesia mencapai jumlah sebanyak 1,1 juta orang. Data lainnya juga dikemukakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, bahwa per 31 Desember 2018 kekurangan guru di Indonesia mencapai jumlah sebanyak 870 orang.

Persoalan lainnya mengenai profesi guru di Indonesia adalah masih banyaknya guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dibawah S1. Hal ini sebagaimana dilansir dari Databoks mengenai data persentase guru yang memiliki kualifikasi minimal S1 menurut Kemendikbud pada tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.6.**

**Persentase Guru Kualifikasi (Minimal S1)**

<b>No.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Sudah Memiliki Kualifikasi S1</b>	<b>Belum Memiliki Kualifikasi S1</b>
1.	SD	79%	21%
2.	PLB	82%	18%
3.	SMP	86%	14%
4.	SMK	91%	9%
5.	SMA	95%	5%

Data tersebut menunjukkan bahwa guru yang sudah memiliki kualifikasi S1 terbanyak berada pada jenjang pendidikan SMA dan SMK sebanyak 95% dan 91%. Sementara itu, untuk guru yang belum memiliki kualifikasi S1 paling banyak berada pada jenjang SD dan PLB sebanyak 21% dan 18%.

Permasalahan profesi guru selain masih cukup banyaknya guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 adalah mengenai hasil uji kompetensi guru (UKG) yang masih rendah. Contoh kasus di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat rata-rata hasil uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.7.**

**Rata-Rata Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2018**

<b>Jenjang</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SMA</b>	<b>SMK</b>
<b>Rata-Rata</b>	56.98	61.00	66.57	59.29

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak guru yang memiliki kompetensi dibawah rata-rata. Padahal kompetensi guru merupakan hal yang harus dipenuhi oleh seorang guru profesional. Untuk itu, rendahnya kompetensi guru menunjukkan bahwa masih banyak guru di Indonesia khususnya di Jawa Barat yang belum profesional dalam menjalankan profesinya.

Data mengenai profesi guru yang telah diuraikan di atas menunjukkan gambaran umum atau kondisi guru di Indonesia. Data tersebut dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan profesi guru di Indonesia. Dengan demikian, mengacu pada berbagai data tersebut dapat menjadi patokan

mengenai kondisi guru di Indonesia sehingga dapat merumuskan kembali kebijakan profesi guru agar dapat memajukan pendidikan nasional.

## **B. Gambaran Umum Pendidikan Profesi Guru di Indonesia**

Kondisi guru di Indonesia saat ini begitu memperhatikan. Pada satu sisi lulusan kependidikan yang tiap tahun bertambah tidak diiringi dengan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang masif. Padahal di masyarakat, saat ini kebutuhan guru begitu mendesak. Belum meratanya jumlah guru dan kurangnya guru di daerah menjadi problematika profesi guru di Indonesia saat ini. Belum lagi ditambah banyaknya guru yang akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan juga menjadi persoalan bagi profesi guru di Indonesia.

Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga pencetak guru setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Akan tetapi tidak diiringi dengan upaya perekrutan guru yang masif dan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang masif pula. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Muhadjir Effendy selaku mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 *suplai* dan *demand* guru mengalami ketidakseimbangan. Setiap tahun LPTK meluluskan sekitar 350 ribu guru. Namun tidak dibarengi dengan perekrutan guru secara masif. Kebutuhan guru sendiri oleh pemerintah hanya sekitar 150 ribu. Untuk itu setidaknya ada 200 ribu guru yang setiap tahunnya terancam menganggur karena melebihi batas kebutuhan guru yang diberikan oleh pemerintah.

Banyaknya lulusan LPTK yang tidak dapat menjadi guru selain disebabkan oleh minimnya kuota perekrutan guru, juga disebabkan oleh terbatasnya penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) setiap tahunnya. Kondisi penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Pembelajaran Ditjen Belmawa menunjukkan bahwa penyelenggaraan PPG dimulai sejak tahun 2013 dengan memberikan kesempatan untuk calon guru mengabdikan diri di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau PPG SM3T. Pada tahun 2013 penyelenggaraan PPG melibatkan 23 Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK). Sementara itu pada tahun 2016, jumlah LPTK yang menyelenggarakan program PPG ini bertambah menjadi 45 LPTK. Kemudian pada saat ini jumlah LPTK yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan program PPG sebanyak 63 LPTK.

Adapun jumlah lulusan atau yang mengikuti program PPG ini sebagaimana data yang disampaikan oleh Direktur Pembelajaran Ditjen Belmawa, Paristiyanti Nurwardani, bahwa guru yang mengikuti PPG untuk pra jabatan atau 36 sks dari lulusan S1 yang mengikuti PPG terdapat sekitar 21 ribu guru. Pada tahun 2017, 7 sampai 8 ribu dari guru tersebut sudah siap ditempatkan ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan guru. Sedangkan untuk jumlah guru yang mengikuti PPG dalam jabatan jumlahnya sekitar lebih dari 78 ribu.

Jumlah yang mengikuti PPG tersebut tentunya belum mencukupi kebutuhan guru di masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Belmawa, Ismunandar, bahwa Indonesia mengalami kondisi kekurangan guru sebanyak 632.740. Jumlah tersebut belum ditambah dengan jumlah guru

yang pensiun pada tahun 2018 sebanyak 106.361. Selain itu, menurut data yang disampaikan, persoalan lainnya dari jumlah guru yang ada masih banyak guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik yang juga cukup tinggi, yakni sekitar 1,6 juta guru.

Adapun secara lebih rinci, sebagaimana dilansir oleh Databoks mengenai guru yang belum tersertifikasi menurut data dari Kemendikbud pada tahun 2019 belum mencapai 50% dari jumlah guru yang ada. Data tersebut secara lengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8.**

**Jumlah Guru yang Tersertifikasi**

<b>No.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Dalam Persen)</b>
1.	SD	45,77%
2.	SMP	48,44%
3.	SMA	41,09%
4.	SMK	28,49%
5.	PLB	45,07%

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru di Indonesia yang tersertifikasi belum mencapai 50%. Artinya, tidak setengah dari jumlah guru yang ada sudah tersertifikasi. Dengan demikian, masih banyak guru-guru di sekolah yang mengajar tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang guru dan dosen.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan bagi profesi guru di Indonesia dimana seharusnya sertifikat pendidik merupakan syarat utama bagi seseorang untuk menjadi guru profesional. Namun, kenyataannya masih banyak guru-guru

yang belum tersertifikasi sampai saat ini. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan upaya pembenahan bagi kebijakan profesi guru di Indonesia.